Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
Vol. 8, No. 2 (2024); pp. 217-234

Map of Tourism Village Management in Kudus Regency, Central Java

Ratna Istriyani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ratna.istriyani@uin-suka.ac.id

Article History
Submit: 7 September 2024
Review: 25 October 2024
Revised: 22 November 2024
Accepted: 20 December 2024

Abstract: This research examine the pioneering process of tourist villages in Kudus, by looking at management and capital that influence tourism development. This research used qualitative approach, with purposive sampling to determine research object and informants by looking at the criteria for 3 sub-districts that have the highest number of tourist villages. Researchers interviewed pioneer actors and tourism village managers and the surrounding community, supported by observational data. The results of this research show that there were differences and disparity in the development of tourist villages in North Kudus and South Kudus. It can be seen from the history of the establishment of tourism and management. The tourist village in North Kudus appears sporadically because there are quite a lot of private parties. This influences the management strategy which is investor-based with the support of financial capital and the sensitivity of actors (investors) in capturing natural potential and visiting opportunities (production center development). It was different from the Tourism Village in South Kudus which historically emerged because of collective awareness (social capital) to develop social activism and economic opportunities through tourism villages. Therefore managing natural and cultural potential carried out collectively by empowering local communities (people center development).

Keywords: Tourism Villages, Management Disparity, and Capital.

How to cite: Istriyani, Ratna (2024). Map of Tourism Village Management in Kudus Regency, Central Java. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, *8*(2), 217-234.
https://doi.org/10.30762/asketik.v8i2.2157

© 2024 by the author. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Pendahuluan

Kajian mengenai desa seringkali tidak bisa dilepaskan dengan dikotomi mengenai desa dengan kota yang menunjukkan karakteristik berbeda. Distingsi tersebut dideskripsikan oleh Durkheim dalam karyanya The Division of Labour yang menyebutkan bahwa pembagian kerja telah membentuk solidaritas. Desa merupakan perwujudan masyarakat homogen dengan pembagian kerjanya rendah (Johnson, 1991: 188). Homegenitas itu terutama disampaikan oleh Koentjaraningrat mengenai karakteristik mata pencaharian masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian (Koentjaraningrat, 1984: 1-3).

Seiring dengan arus perubahan dan global, menurut Rahardjo kajian mengenai desa tidak bisa disamakan dengan tempo lalu, terutama dalam hal ekonomi alternatif selain pertanian (Rahardjo, 2017: 12-13). Tren baru alternatif mengenai ekonomi desa adalah perintisan desa wisata. Hal itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, bahwa pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) merupakan penggerak aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan (Kemenparekraf, 2021).

Program ekonomi kreatif melalui pengelolaan desa wisata rupanya juga telah berpengaruh kepada Kabupaten Kudus. Selama ini Kudus dikenal sebagai destinasi wilayah religi seiring dengan jejak situs jejak wali yang populer yaitu Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Muria. Namun pada akhir tahun 2020 Kudus menunjukkan geliat perkembangan desa wisata. Setidaknya ada 15 desa di 9 kecamatan yang ditetapkan sebagai desa wisata, yaitu Rahtawu, Ternadi, Dukuhwaringin, Kandangmas, Margorejo, Terban, Temulus, Jepang, Loram Kulon, Wates, Wonosoco, Padurenan, Jurang, Kaliputu, dan Tanjung Rejo (Pemprov Jateng, 2020). Setahun kemudian, 13 desa menyusul bertransformasi menjadi desa wisata yaitu Desa Karangampel, Desa Menawan, Desa Gribig, Desa Kauman, Desa Japan, Desa Klaling dan Desa Janggalan. Kemudian Desa Karangrowo, Desa Kajar, Desa Pedawang, Desa Ngemplak, Desa Kedungdowo, serta Desa Gondosari (Rahman, 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa desa wisata menjadi preferensi alternatif ekonomi di Kudus. Hal ini seolah mengikuti tren era kepariwisataan kekinian yang lekat dengan kebutuhan nostalgia terhadap tradisi tempo dulu dan nuansa alam. Tren kebutuhan itu kemudian menentukan pengemasan pengelolaan wisata di desa (Istriyani,

2021). Hal yang menarik kemudian bahwa desa wisata adalah model ekonomi kreatif yang dimotori oleh masyarakat lokal yang memiliki konteks yang khas, salah satunya di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, model pengelolaan adalah kajian yang penting dalam melihat desa wisata, terutama dampaknya bagi masyarakat lokal.

Kendati demikian, secara aspek geografi dan aksesibilitas, wilayah Kudus Utara dan Selatan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Dimana Kudus Utara dikenal dengan wilayah pegunungan dan kental dengan popularitas situs ziarah Sunan Muria dan dekat dengan pusat kota serta Situs Sunan Kudus. Berbeda dengan Kudus Selatan yang merupakan dataran rendah, rawan banjir, jauh dari kota dan akses jalan yang masih kurang memadai. Hal itu berkorelasi dengan respon terhadap peluang dan pengelolaan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini berusaha untuk mengkaji tentang disparitas pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kudus dengan menggali dua hal: 1) proses rintisan dan pengelolaan desa wisata di Kudus Utara dan Kudus Selatan, 2) modal-modal yang mendukung atau berpengaruh pada rintisan hingga pengembangan wisata, dan 3) dampak sosial ekonomi keberadaan desa wisata bagi masyarakat di Kudus Utara dan Kudus Selatan.

Penelitian ini menggunakan konsep terkait dengan wisata berbasis masyarakat. Asumsinya adalah Desa wisata merupakan perwujudan dari community based tourism (wisata berbasis masyarakat). Rocharungsat memaparkan bahwa wisata berbasis masyarakat didasari atas kesadaran masyarakat lokal akan kebutuhan. Dalam hal ini dapat juga disebut sebagai pariwisata responsif karena menekankan pada asas partisipasi demokratis masyarakat lokal dalam penentuan kebijakan wisata. Masyarakat lokal adalah subyek utama yang secara aktif terlibat dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi guna mencapai kesejahteraan bersama yang disesuaikan dengan aspek kebutuhan (Gianna, 2008a).

Merujuk pada konsep di atas, desa wisata sebagai manifestasi community based tourism lekat dengan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan mengamanatkan pada perlunya power dan menekankan keberpihakan pada kelompok yang tidak berdaya. Kabber memfokuskan pemberdayaan pada tiga dimensi yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan pada kehidupan seseorang yaitu akses terhadap sumber daya, agen, dan hasil (Zubaedi, 2007: 95-97). Sementara itu Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan

keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan dan memengaruhi kehidupan masyarakat (Zubaedi, 2007: 98).

Pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif. Oleh karena ini Asian Development Bank (ADB) menjelaskan lima karakteristik pemberdayaan yang komprehensif. Pertama, berbasis lokal yaitu pemberdayaan harus melibatkan sumber daya lokal dan hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat lokal. Kedua, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan bukan untuk meningkatkan produksi atau kuantitas semata. Ketiga, berbasis kemitraan dengan prinsip simbiosis mutualisme antara orang yang kurang mampu dengan orang yang lebih mampu. Dengan begitu kemitraan akan membuka akses terhadap teknologi dan pengetahuan. Keempat, bersifat holistik yaitu mencakup semua bidang. Oleh karena itu sumber daya lokal perlu diketahui dan didayagunakan. Kelima, berkelanjutan dengan indikator tidak ada ekploitasi dalam segi ekonomi dan tidak merusak tatanan sosial masyarakat (Zubaedi, 2007: 99).

Melengkapi karakteristik di atas, Kartasasmita (dalam Zubaedi, 2007: 103) pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah. Pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Artinya masyarakat sebenarnya memiliki potensi sehingga langkah pemberdayaan diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Selanjutnya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam hal ini langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, pemberian modal, informasi, dan sebagainya. Hal yang kemudian penting adalah melindungi masyarakat (protection), yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap persaingan atau eksploitasi melalui keberpihakan atau adanya aturan kesepakatan yang jelas untuk melindungi masyarakat bawah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan bagi penelitian ini. Pertama, penelitian Doni Sugianto Sihotang dan Achmad Hidir dengan judul "Strategi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Joint Tourism Pada Objek Wisata Sungai Gagak di Desa Koto Mesjid,Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembaruan strategi pengelolaan berbasis joint tourism menentukan peningkatan pendapatan ekowisata. Adapun strategi joint tourism adalah dengan membangun relasi

dengan ekowisata (Pokdarwis) sekitarnya lebih berkembang. Manifestasi relasi itu berupa dukungan promosi atau rekomendasi wisata kepada pengunjung, hingga paket kunjungan. Hal itu yang menginsiasi peneliti untuk melihat bahwa relasi menjadi penentu pengelolaan desa wisata. Namun demikian, penelitian tersebut tidak mengeksplanasi secara mendalam bagaimana relasi tersebut bisa terbangun, apa faktornya yang membuat Pokdarwis lain bisa menerima kerjasama (Sihotang & Hidir, 2022).

Kedua yaitu penelitian oleh Amrullah,dkk mengenai "The Influence of Capability, Business Innovation, and Competitive Advantage on a Smart Sustainable Tourism Village and Its Impact on the Management Performance of Tourism Villages on Java Island" (Amrullah et al., 2023). Penelitian tersebut lebih melihat tingkat pengaruh variabel kapabilitas, inovasi bisnis, dan kesadaran keuntungan kompetitif terhadap keberlanjutan dan performa manajemen desa wisata. Adapun bagaimana masing-masing variabel mempengaruhi keberlanjutan dan performa manajemen desa wisata tidak begitu dijelaskan.

Ketiga yaitu penelitian "Rural Tourism Resource Management Strategies: A Case Study Of Two Tourism Villages In Bali" (Rosalina et al., 2023). Penelitian tersebut memperlihatkan perbedaan paradigma kedua masyarakat dalam melihat wisata secara ekonomistik ataupun lingkungan. Perbedaan paradigma memperlihatkan perbedaan negosiasi dan posisi tawar adat terhadap investor yang masuk untuk mengelola wisata. Komparasi itu turut menginisiasi penulis untuk melihat pada obyek lain di Jawa Tengah, namun dengan konteks sosial berbeda.

Merujuk pada beberapa penelitian tersebut ada beberapa research gap yang penulis tawarkan pada tulisan ini antara lain.

a. Bagaimana bangunan relasi kerjasama itu terjalin dan dimobilisasi pada perintisan dan pengelolaan desa wisata.
b. Kapabilitas yang dimiliki oleh aktor dalam memobiliasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata termasuk mobilisasi modal sosial
c. Disparitas pengelolaan berbasis investasi dan modal lokal

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji proses rintisan desa-desa wisata di Kudus Utara dan Selatan, dengan turut melihat pengelolaan hingga modal-modal

(material/investasi dan sosial) yang berpengaruh dalam pengembangan wisata, serta dampaknya bagi masyarakat lokal.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu berupaya untuk mengeksplorasi dan melakukan klarifikasi terhadap suatu fenomena (Faisal, 2010: 20). Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu 3 lokasi kecamatan berbeda dengan beberapa tahap pemetaan. Pertama, peneliti memetakan kecamatan di wilayah Kudus yang memiliki jumlah desa wisata terbanyak. Kedua, peneliti mengumpulkan profil dan sejarah singkat desa wisata dari sumber website dan media sosial dari masing-masing desa wisata, kemudian menentukan desa wisata tertua, terbaru, hingga terpopuler. Hasil dari pemetaan tersebut terjaring 3 desa wisata yaitu desa wisata Pijar Park di Kecamatan Dawe, desa wisata Wonosoco di Kecamatan Undaan, dan desa wisata Rahtawu di Kecamatan Gebog.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi meliputi pencatatan fenomena sistematis yang dilakukan secara non partisipatif (Idrus, 2009: 101). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat kegiatan sosial ekonomi pada masyarakat di kawasan desa wisata, potensi ekonomi, obyek wisata yang ditawarkan, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengelolaan wisata. Selanjutnya wawancara merupakan aktivitas mengajukan pertanyaan, mendengarkan, mengungkapkan, dan merekam apa saja yang dikatakan. Wawancara dilakukan dilakukan dalam berbagai arah, terbuka, informal, namun mendalam (Neuman, 2013: 494). Bahkan wawancara juga dilakukan pada saat observasi berlangsung. Wawancara dilakukan kepada informan-informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling yaitu menentukan langsung informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Neuman, 2013: 298-299). Dalam hal ini kriteria informan yang diperlukan adalah aktor perintis dan pengelola desa wisata. Informan perintis memberikan data terkait proses perintisan dan faktor yang mendukung perubahan desa menjadi desa wisata. Adapun pengelola desa wisata memberikan informasi terkait strategi pengelolaan. Berdasarkan teknik tersebut tersaring 5 informan yaitu Pengelola Desa Wisata Rahtawu dan sekitarnya (Kecamatan Gebog), Pengelola Desa Wisata Wonosoco (Kecamatan Undaan), dan Pengelola Wisata Pijar Park (Kecamatan Dawe).

Pasca observasi dan wawancara, data dianalisis guna mendapatkan penyajian yang sistemtis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif model interaktif oleh Miles dan Hubberman yang meliputi berikut. 1) Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan dan mentranskrip hasil observasi dan wawancara. 2) Reduksi yaitu memilah data observasi dan wawancara yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilahan data digunakan membuat kategorisasi data yang berkaitan dengan proses transformasi desa wisata, modal-modal yang mendukung transformasi desa wisata, serta dampak transformasi terhadap masyarakat sekitar. 3) Penyajian data yaitu membuat kerangka pembahasan dan mengembangkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Penyajian data secara narasi dan mengkombinasikan dengan tabel, gambar, serta bagan. 4). Penarikan simpulan (Idrus, 2009: 147-152).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kudus

Kudus merupakan kabupaten yang secara sosial dipengaruhi oleh kultur pesantren dengan mayoritas penduduknya menganut Islam yaitu 95% (BPS, 2015). Peradaban Islam Kudus dipengaruhi oleh jejak kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Islam Demak pada abad ke 16 didukung dengan tokoh kewalian di Kabupaten Kudus, yaitu ajaran Sunan Kudus dan Sunan Muria (Media, 2022). Berbagai nilai dan tradisi Islam cukup kental di Kabupaten Kudus seperti Gusjigang (singkatan dari Bagus, Ngaji, dan Dagang) tuntutan dari Sunan Kudus yang menjaga keseimbangan dunia dan akhirat (Ihsan, 2018), Ziarah Wali, Manakiban sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang shaleh melalui cerita biografi mengenai mereka (Rahmawati, 2019) dan Buka Luwur adalah tradisi membuka dan mengganti Luwur atau kain penutup/mori makam Sunan Kudus yang dilaksanakan pada 1 hingga 10 Muharram (Kemdikbud, 2014). Adapun pada tradisi Buka Luwur disertai dengan pembagian Sego Berkat yang dianggap sebagai sumber berkah bagi masyarakat (PPID Kudus, 2022).

Dari aspek ekonomi penyangga utama adalah industri tembakau (64%) yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 75% seperti Djarum, Najarana, dan Sukun. Oleh karena itu tidak heran jika Kudus kemudian dikenal dengan "Kota Kretek". Setelah industri tembakau, disusul dengan industri pakaian, industri makanan, dan industri minuman (BPS, 2015). Kendati demikian, aspek kepariwisataan Kudus cukup menarik. Terkenal

sebagai kota Wali, branding wisata Kudus dikenal dengan Wisata Religi dengan adanya 2 situs sejarah yaitu Makam Sunan Kudus dan Masjid Menara Kudus di pusat kota serta Situs Makam Sunan Muria yang terdapat di pegunungan sisi utara. Tahun 2020 kepariwisataan Kudus mengalami pergeseran, ditandai dengan progesivitas desa wisata di Kabupaten Kudus. Pada akhir tahun 2020, 15 desa yang tersebar di 9 kecamatan ditetapkan sebagai desa wisata, yaitu Rahtawu, Ternadi, Dukuhwaringin, Kandangmas, Margorejo, Terban, Temulus, Jepang, Loram Kulon, Wates, Wonosoco, Padurenan, Jurang, Kaliputu, dan Tanjung Rejo (Anonim,2020) . Setahun kemudian, 13 desa menyusul bertransformasi menjadi desa wisata yaitu Desa Karangampel, Desa Menawan, Desa Gribig, Desa Kauman, Desa Japan, Desa Klaling dan Desa Janggalan. Kemudian Desa Karangrowo, Desa Kajar, Desa Pedawang, Desa Ngemplak, Desa Kedungdowo, serta Desa Gondosari (Rahman, 2021).

Historisitas dan Mekanisme Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus

Terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Kudus yang memiliki pertumbuhan kuantitas desa wisata paling progresif, antara lain di Kecamatan Dawe, Gebog, dan Undaan. Dari masing-masing kecamatan penulis menentukan salah satu desa wisata paling populer yaitu Desa Wisata Pijar (Pijar Park) di Kecamatan Dawe, Desa Wisata Rahtawu di Kecamatan Gebog, dan Desa Wisata Wonosoco di Kecamatan Undaan. Masing-masing desa wisata memperlihatkan serangkaian sejarah, proses rintisan, hingga mekanisme pengelolaan yang cukup berbeda.

a. Desa Wisata Pijar (Pijar Park)

Desa Wisata Pijar atau sekarang lebih dikenal sebagai Pijar Park terletak di sisi utara Kudus tepatnya di bawah lereng pegunungan Muria, bahkan dekat dan sejalur dengan situs ziarah Makam Sunan Muria. Memiliki topografi pegunungan dengan suhu sejuk, membuat Pijar Park lebih menawarkan wisata alam dan pengalaman outbond yang dengan segmentasi tempat rekreasi keluarga (Ysf, 2022).

Pijar Park sebelumnya lebih dikenal dengan Bumi Perkemahan yaitu Wisata Kajar (tahun 2019-2020). Wisata dikelola oleh CV dengan model sewa lahan untuk perkemahan, dan rupanya tidak memberi penghasilan yang signifikan. Hal itu ditambah dengan problem pandemi tahun 2020, sehingga pengelolaan Wisata Kajar kemudian berhenti (Ysf, 2022).

Pada tahun 2021 pengelolaan beralih Ysf dan Wisata Kajar kemudian berubah nama menjadi Wisata Pijar (Pinus Kajar). Peran Ysf adalah sebagai pemilik modal sekaligus pengelola yang menyewa lahan. Dalam hal ini, pemilik lahan kawasan Pijar Park secara hukum adalah Perhutani, kemudian memberikan izin Hak Guna dengan pembagian profit 30% (untuk perhutani) dan 70% (untuk pengelola). Selain memperoleh Hak Guna dari Perhutani, Ysf juga harus memperoleh izin dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Kajar yang dengan status bagi hasil profit 10% (untuk desa), 90% (untuk pengelola, setelah pembagian dengan Perhutani). Kendati demikian, pembagian hasil profit diberikan pada tahun ketiga atau setelah dua tahun pengelolaan. Pada pengelolaan ini, Ysf dibantu oleh kolega bisnisnya yaitu Atn sebagai manager wahana wisata, dan Atk sebagai manajer resto Pijar Park (Ysf, 2022).

Selain itu, pengelolaan Pijar Park juga menggandeng 30 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu pedagang masyarakat sekitar. Model pelibatan ini adalah dengan memberikan peluang khusus kepada warga sekitar untuk menyewa lapak di kawasan obyek wisata. Model biaya sewa tidak langsung menentukan tarif namun dengan model bagi hasil yaitu memberi 10% dari profit pendapatan. Selain itu untuk memastikan stabilitas usaha, barang-barang jualan dalam bentuk makanan ringan di-supplay dari internal pengelola Pijar Park. Supplay produk dilakukan karena pedagang cenderung menjual produk yang sama (Ysf, 2022).

b. Desa Wisata Rahtawu

Rahtawu merupakan obyek wisata desa yang di sisi utara Kudus dengan topografi dataran tinggi. Sama-sama berada di dekat Pegunungan Muria, Desa Rahtawu dan Muria dipisah oleh Sungai Cekal. Model pengelolaan di kawasan Rahtawu memang mirip dengan kawasan Pijar Park artinya pengelolaan spot wisata berdasarkan pada kepemilikan lahan. Mayoritas lokasi diubah menjadi tempat kuliner dengan memanfaatkan nuansa sungai dan pegunungan. Walaupun menarik, namun pengunjung di wilayah Rahtawu tidak sebanyak di kawasan Muria. Hal itu disebabkan karena akses jalan kurang begitu memadai dan sempit.

Kendati mayoritas pengelolaan spot wisata berdasar pada kepemilikan lahan secara pribadi, namun ada satu destinasi wisata seperti taman ikonik Rahtawu bernama Taman Colo Indah (Rahtawood) yang dikelola oleh BUMDes Rahtawu yang

berdiri pada tahun 2017 (Rmytn, 2022). Adapun daya tarik wisata yang disajikan Rahtawood meliputi bumi perkemahan, sewa tempat makrab, taman bermain, dan wisata alam Sungai Cekal.

Rahtawood mengalami pasang surut hingga reorganisasi karena seiring munculnya konflik terkait dengan kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan hingga insinkronisasi antara BUMDes dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata. Akhirnya pengelolaan diambil alih BUMDes karena masalah pembagian kerja yang berjalan ketika sebelumnya dikelola oleh Pokdarwis (Rmytn, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata hanya sebatas tenaga kerja sebagai petugas atau karyawan. Hal itu dikarenakan masyarakat sekitar masih kurang antusias sehingga sulit untuk membangun partisipasi dan kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Taman Colo (Rahtawood).

c. Desa Wisata Wonosoco

Desa Wisata Wonosoco terletak di Kudus bagian selatan, berbatasan dengan Purwodadi. Berbeda dengan Kudus bagian Utara, wilayah Kudus bagian selatan bertopografi dataran rendah namun juga terdapat pegunungan kapur. Desa Wisata Wonosco lebih dikenal dengan Desa Wisata Sendang Dewot Wonosoco (Dewi Sadewo), dikelola oleh Pokdarwis Wonosoco. Berdiri pada tahun 2010 dengan sebagian wilayah lahan Perhutani dan sebagian lagi tanah desa. Munculnya Desa Wisata Wonosoco diinisiasi oleh Kepala Bidang Pariwisata Pusat pada saat itu berkunjung ke Desa Wonosoco. Ia melihat adanya potensi, sehingga menyampaikan kepada warga bagaimana caranya agar dapat dikunjungi sebagai tujuan wisata (Gnd, 2022).

Obyek alam yang ditawarkan di Desa Wisata Wonosoco adalah Alas Jati Sewu, Goa, dan Bumi Perkemahan. Namun, obyek alam tersebut tidak cukup menjadi daya tarik sebab suhu di dataran rendah yang cenderung lebih panas, berbeda dengan wilayah Kudus bagian utara di mana obyek alam menjadi komoditas unggulannya. Satu-satunya obyek alam yang memberikan pendapatan adalah Bumi Perkemahan, selain disewa sebagai area berkemah juga sering disewa komunitas untuk acara tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Desa Wonosoco cenderung melakukan branding kepada aspek budaya.

Ada beberapa obyek budaya khas yang ditawarkan antara lain Wayang Klitik, yang biasanya diselenggarakan pada Bulan Juli, situs sejarah dan mitologi Sendang Dewot dan Gading, Wayang, situs makam sejarah Mbah Pakis Aji, situs makam sejarah Mbah Kariyah, situs makam sejarah Mbah Dewi Roro Upas, dan situs makam sejarah Mbah Dewi Sekar Taji. Selain itu, kuliner juga menjadi daya tarik yang diunggulkan. Sejumlah kuliner khas disajikan yaitu Nasi Jagung, Bothok Yuyu, Sayur Lompong, Bothok Petet, Peyek Teri, Wedang Coro, dan Dudo Kemul (Gnd, 2022).

Disparitas Pengelolaan dan Modal Pendukung Tranformasi Desa Wisata di Kudus

Model pengelolaan wisata desa di tiga wilayah tersebut diatas rupanya mempelihatkan adanya disparitas. Hal itu terutama dilihat dari perbedaan potensi masing-masing wilayah yang kemudian menentukan tipologi pengelolaan. Pada ulasan ini, pemetaan dibedakan berdasarkan wilayah yaitu Desa Wisata di Kawasan Kudus Utara dan Kudus Selatan. Klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan letak geografis yang ternyata menentukan potensi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan. Tidak hanya daya tarik, karakteristik alam juga menetukan tipe atau model pengelolaan hingga jenis modal yang mendukung tranformasi wisata di Kabupaten Kudus.

a. Desa Wisata di Kudus Utara

Desa-desa wisata di Kudus bagian utara potensi utamanya dapat dilihat dari letak geografisnya yang berada di pegunungan Muria. Suasana asri dan sejuk menjadi daya tarik bagi masyarakat pantura untuk menikmati suasana relaksasi selain pantai. Oleh karena itu, daya tarik wisata yang ditawarkan adalah pesona alam dan pengalaman outbond. Selain itu nilai plus dari desa-desa wisata di Kudus utara adalah peluang pengunjung sebagai bagian dari domino effect dari adanya wisata religi (Ziarah Makam Sunan Muria). Hal itu disampaikan pula oleh Ysf selaku direktur pengelola Pijar Park yang menyasar pengunjung luar Kabupaten Kudus sebagai segmentasi pasarnya dan peziarah Sunan Muria pada khususnya (Ysf , 2022).

Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa desa-desa wisata di Kudus terutama tumbuh masif pada masa pandemi atau pasca pandemi. Hal itu juga yang tampak pada desa-desa wisata di Kudus bagian utara. Faktor yang

mendukung tentu saja adalah investasi modal material yang besar pada pengembangannya. Hal itu yang terutama tampak pada Pijar Park dan beberapa obyek lainnya di Rahtawu selain Rahtawood yang dikelola oleh BUMDes Rahwatu.

Investasi modal lebih didominasi oleh modal personal atau kelompok yang kemudian memunculkan istilah kepemilikan aset. Modal personal memang memberi akses yang leluasa bagi pengelola (sekaligus pemilik modal) untuk mengembangkan daya tarik wisata sebagai lahan bisnis. Hal itu pula yang tampak pada Pijar Park yang baru dibuka pada tahun 2020, secara pasti telah menambah obyek berupa resto, cottage yang bertarif di atas lima ratus ribu, dan sekarang sedang dibangun wahana outbond anak-anak (Atk, 2022). Hampir sama dengan beberapa spot destinasi di Rahtawu yang lebih banyak mengemasnya menjadi tempat kuliner dan rekreasi air. Adapun pengelolaan di Rahtawu mayoritas dilakukan secara pribadi, karena lokasi-lokasi tujuan wisata merupakan milik pribadi. Kendati ada wisata yang dikelola oleh BUMDes, seperti Rahtawood, konsistensinya pengelolaannya belum begitu terlihat. Hadirnya para investor tentu saja dipengaruhi oleh potensi alam yang mudah dikembangkan menjadi daya tarik wisata serta potensi minat pengunjung, sehingga menentukan capital return serta profit yang realistis.

Berdasar pada realitas tersebut desa-desa wisata di Kudus bagian utara lebih merepresentasikan sebagai usaha wisata berbasis aset personal atau privat, sehingga belum bisa dikatakan sebagai wisata berbasis komunitas seperti yang diinstruksikan dalam model desa wisata. Hal itu diukur dari indikator yang disampaikan Rocharungsat bahwa wisata berbasis masyarakat harusnya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi secara demokratis (Gianna, 2008a). Kendati masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wisata di Pijar Park, pelibatan masyarakat tidak dilakukan sedari perencanaan. Mereka justru terlibat sebagai sebagai pekerja, yaitu bekerja di dalam area dalam obyek wisata, bekerja di luar obyek wisata (meliputi tukang parkir, tiket, dan sejenisnya), dan tukang pengembangan (bekerja pada konstruksi dan rehabilitasi bangunan).

Di wilayah Pijar Park sebenarnya terdapat BUMDes, namun perannya lebih sebatas sebagai host yang menentukan apakah Pijar Park bisa terus beroperasi atau tidak. Hal tersebut kemudian justru menunjukkan relasi pertukaran sosial (cenderung transaksional) dibandingkan dengan kerjasama kolektif, sebab pada akhirnya Pijar

Park memberikan kontribusi bagi hasil dengan persentase tertentu dari laba yang diperoleh sebagai bentuk guna lahan.

Merujuk pada hal tersebut modal investasi hingga otoritas personal atau kelompok lebih berpengaruh terhadap tumbuhnya rintisan hingga pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, wisata desa belum memperlihatkan praktik pemberdayaan karena tidak ada unsur enabling yang membuat masyarakat sadar dan berupaya mengelola aset potensialnya secara kolektif. Selain itu juga tidak ada unsur empowering karena masyarakat yang masuk dalam pengelolaan berposisi sebagai pekerja (worker) yang tidak memiliki otoritas untuk menentukan perencanaan, pengelolaan, bahkan evaluasi. Oleh karenanya, tidak ada pelatihan yang didapat. Bahkan pihak pengelola (investor) justru mengharapkan adanya program pelatihan kepada UKM di area wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, agar mereka bisa menciptakan produk variatif agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Implikasinya kemudian proteksi terhadap pemanfaatan aset desa secara kolektif pun juga belum bisa terjamin karena aset menjadi otoritas pemilik modal investasi yang berorientasi pada profit. Oleh karena itu, ketimpangan income pun sebagai hal yang tak terhindarkan antara pengelola dengan masyarakat lokal yang bekerja di sana.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di wilayah Rahtawu, di mana model pengelolaan dilakukan berdasarkan aset personal. Kendati terdapat satu spot wisata yang dikelola BUMDes (Rahtawood), namun selanjutnya justru obyek tersebut tidak berkembang secara optimal karena pesisme bahwa pengelolaan kolektif akan memberi keuntungan bersama. Oleh karena itu partisipasi masyarakat mulai perencanaan sampai pengelolaan Rahtawood tidak terealisasi dengan baik. Mereka cenderung memilih untuk memanfaatkan peluang secara individual dan sporadis dengan membuka lapak di sepanjang area wisata. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengembangan Rahtawood sebagai wisata berbasis komunitas belum dilandasi kesadaran akan kebutuhan. Padahal kesadaran masyarakat lokal terkait kebutuhan membangun wisata komunitas menjadi landasan utama. Kesadaran terhadap kebutuhan selanjutnya menentukan aksi terhadap realisasi pengelolaan potensi wisata secara kolektif (Rocharungsat dalam Gianna, 2008).

Di sisi lain modal sosial rupanya juga perlu, di samping modal material, terutama kepercayaan. Hal itu guna meminimalisir konflik internal dan meramu

kerjasama kolektif dalam pengelolaan, seperti yang disampaikan La Porta bahwa kepercayaan menjadi landasan fundamental dalam menentukan kerjasama (Dasgupta & Serageldin, 2000). Jika kesadaran akan kebutuhan dan modal sosial tidak ada, maka wisata yang terbangun cenderung temporer dan tidak berlanjut (unsustainable). Setidaknya itu yang terjadi pada Rahtawood yang mengalami kesulitan untuk berkembang dan bertahan, dibandingkan dengan aset-aset yang dikelola secara personal di wilayah sekitarnya. Ketiadaan kepercayaan masyarakat dalam mekanisme pengelolaan justru menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran. Masyarakat yang mulanya membuka lapak dihimbau memberi kontribusi sejumlah Rp 1.000,- pada setiap transaksi Rp 25.000,-. Kontribusi tersebut dimaksudkan untuk income kas desa dan pengembangan obyek wisata. Namun, masyarakat masih menolak, sebab usaha yang mereka lakukan adalah milik pribadi. Selain itu, adanya kekhawatiran jika Rahtawood berkembang pesat akan berpengaruh pada penurunan pengunjung dan pendapatan tempat wisata sekitarnya (Rmytn, 2022).

b. Desa Wisata Kudus Selatan

Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, Kudus bagian selatan memiliki potensi yang berbeda dibandingkan Kudus bagian utara. Kudus bagian Selatan bertopografi dataran rendah yang dikelilingi pengunungan kapur (Pegunungan Kendeng). Topografi tersebut berkonsekuensi pada kondisi rawan banjir dan suhu udara yang lebih tinggi. Kondisi demikian menjadi kendala jika hanya mengandalkan potensi alam sebagai brand wisata. Oleh karena itu, desa wisata di bagian selatan cenderung membangun branding pada aspek sosial budayanya (kearifan lokal), lebih khususnya adalah budaya.

Kendati tidak memiliki keistimewaan pada potensi alam sebagai obyek wisata, namun masyarakat (dalam Pokdarwis Dewi Sadewo) justru percaya diri untuk mengembangkan potensi situs sejarah dan seni sebagai komoditas wisata. Hal itu tentu juga tidak mudah mengingat akses menuju lokasi Desa Wisata Wonosoco juga tidak mudah dan jauh dari pusat kota. Namun, rupanya masyarakat lokal memiliki optimisme serta kesadaran terkait kebutuhan membangun wisata berbasis pada budaya. Hal itu merupakan landasan fundamental yang diperlukan untuk membangun wisata berbasis komunitas , dalam hal ini desa wisata (Rocharungsat dalam Gianna, 2008).

Peran kepemimpinan dari ketua Pokdarwis menjadi energi yang bisa mempertemukan kebutuhan masyarakat dalam membangun wisata melalui serangkaian proses rintisan hingga komitmen mengembangkan. Hal itu terlihat dari diperolehnya dana hibah dari Kementerian Pariwisata Pusat (Gnd, 2022) yang digunakan untuk menambahkan fasilitas wisata di Wonosoco. Partisipasi dan kolektivitas dari masyarakat pun juga menjadi modal utama dari eksistensi Desa Wisata Wonosoco hingga saat ini. Hal itu nampak dari pembagian kerja yang diberikan kepada masyarakat mulai dari pengelola inti hingga pengelola lapangan yang masih bertahan hingga kini. (Gnd, 2022). Eksistensi Desa Wisata Wonosoco diperkuat dengan masuknya Desa Wonosoco dalam database official.cbtindonesia.com.

Merangkum pada analisis terhadap desa wisata di Kudus Utara dan Kudus Selatan, terdapat disparitas terkait strategi pengelolaan. Kudus Utara memperlihatkan model pengelolaan dan pengembangan production center development yaitu adanya dukungan modal atau investasi kelompok sehingga pengelolaannya tersentralisasi pada pemilik modal. Kemudian keuntungan besar yang dimiliki adalah aspek geografis dan potensi alam yang rupanya berkorelasi dengan potensi kunjungan. Model pengelolaan wisata berbasis komunitas tidak begitu berkembang karena ketiadaan modal sosial terutama kepercayaan. Padahal modal sosial menentukan pendirian hingga pengembangan wisata desa berbasis komunitas (Aritenang, 2021).

Adapun Kudus Selatan merepresentasikan model pengelolaan people center development yaitu selain potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata, partisipasi, pemberdayaan, dan keswadayaan lokal menjadi modal yang mendukung terealisasinya pengelolaan dan pengembangan wisata. Poin penting yang kemudian perlu digaris bawahi di sini bahwa optimalisasi potensi sangat bergantung pada pemanfaatan modal sosial, yaitu relasi kolektif dari masyarakat lokal yang sama-sama memiliki kepercayaan untuk bekerjasama atau berpartisipasi di dalam perintisan dan pengelolaan wisata. Di sisi lain pemimpin juga menjadi motor penggerak yang menentukan bertemunya potensi alam, modal sosial, dan kebutuhan membangun wisata desa.

Tabel Pemetaan Modal Pendukung Perintisan dan Pengelolaan Desa Wisata

No	Wilayah	Modal Utama	Modal Pendukung	Tipologi

1	Kudus Bagian Utara, misalnya: Gebog (Rahtawu) dan Dawe	1. Potensi alam: daya tarik alam 2. Potensi pengunjung dari wisatawan religi di Makan Sunan Muria	Investasi Personal (modal material)	*production center development*
2	Kudus Bagian Selatan, misalnya: Undaan	1. Potensi alam: daya tarik alam (bumi perkemahan) 2. Potensi Budaya	Investasi Sosial (modal sosial dan *leadership*)	*people center development*

Perbedaan tipologi pengelolaan tersebut rupanya menentukan (sustainability) keberlanjutan desa wisata itu sendiri serta dampaknya bagi masyarakat secara kolektif (Nasdian, 2015). Dampak finansial dari pengelolaan desa wisata di Kudus Utara lebih banyak diperoleh pengelola (investor) sebagai aktor utama. Sedangkan desa wisata di Kudus Selatan dampak finansial merata dirasakan masyarakat lokal sebagai perintis dan pengelola (Pokdarwis).

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji proses rintisan desa-desa wisata di Kudus Utara dan Selatan, dengan turut melihat strategi pengelolaan hingga modal-modal (material/investasi dan sosial) yang berpengaruh dalam pengembangan wisata. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan potensi alam berpengaruh terhadap tipologi pengelolaannya. Hal itu tampak pada desa wisata di Kudus Utara yang memiliki potensi alam dan pengunjung yang menjanjikan. Hal itu mendorong masuknya investor masuk untuk sekaligus mengelola sehingga modal material itu yang mendukung pertumbuhan wisata disana (production center development). Berbeda dengan kawasan Kudus Selatan yang secara akses dan potensi alam untuk wisata kurang begitu menonjol, dan potensi pengunjung kurang sebagus wilayah Kudus Utara. Namun kesadaran kolektif justru menjadi modal utama untuk pengelolaan desa wisata (people center development). Hal itu terutama tampak di Desa Wisata Wonosoco yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata.

Daftar Pustaka

Amrullah, Kaltum, U., Sondari, M. C., & Pranita, D. (2023). The Influence of Capability, Business Innovation, and Competitive Advantage on a Smart Sustainable Tourism Village and Its Impact on the Management Performance of Tourism Villages on

Java Island. Sustainability, 15(19), Article 19. https://doi.org/10.3390/su151914149

Anonim. 2020. 15 Desa di Kudus Jadi Desa Wisata. (n.d.). Retrieved October 30, 2021, from https://jatengprov.go.id/beritadaerah/15-desa-di-kudus-jadi-desa-wisata/

Anonim. Warisan Budaya Takbenda | Beranda. (n.d.). Retrieved December 21, 2022, from https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=4712

Aritenang, A. (n.d.). The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages. https://doi.org/10.1177/21582440211044178

Atk. (2022, September 3). Sejarah dan Pengelolaan Pijar Park [Personal communication].

BPS, B. (2015). Kudus dalam Angka Tahun 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

Buka Luwur Kangjeng Sunan Kudus Bagian Dari Nguri-uri Budaya | PPID Kudus. (n.d.). Retrieved December 21, 2022, from https://ppid.kuduskab.go.id/post/312/buka-luwur-kangjeng-sunan-kudus-bagian-dari-nguri-uri-budaya

Dasgupta, P., & Serageldin, I. (2000). Social Capital: A Multifaced Perspective. The World Bank.

Faisal, S. (2010). Format-format Penelitian Sosial. Raja Grafindo Persada.

Gianna, M. (ed). (2008a). Building Community Capacity For Tourism Development. CAB International.

Gianna, M. (ed). (2008b). Building Community Capacity For Tourism Development. CAB International.

Gnd. (2022, September 3). Pengelolaan Desa Wisata Wonosoco [Personal communication].

Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga.

Ihsan, M. (2018). Gusjigang; Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi. Iqtishadia, 10(2), Article 2.

Istriyani, R. (2021). Consuming Leisure Time: How The Tourism Trend Has Changed the Village | Journal of Contemporary Sociological Issues. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JCSI/article/view/19803

Kemenparekraf. (n.d.). Desa Wisata Terus Tumbuh Sebagai Pariwisata Alternatif. Kemenparekraf. Retrieved October 30, 2021, from https://www.kemenparekraf.id

Koentjaraningrat, K. (1984). Masyarakat Desa di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Media, K. C. (2022, September 15). Peranan Kerajaan Demak dalam Menyebarkan Islam di Pulau Jawa Halaman all. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/190000879/peranan-kerajaan-demak-dalam-menyebarkan-islam-di-pulau-jawa

Nasdian, F. T. (2015). Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Indeks.

Rahardjo. (2017). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University Press.

Rahmawati, U. (2019). Motif Sosio-Theogenetis dalam Tradisi Manakiban Masyarakat Mejobo Kudus. FIKRAH, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i1.4842

Rmytn. (2022, Agustus). Pengelolaan Taman Wisata Colo (Rahtawood) [Personal communication].

Rosalina, P. D., Dupre, K., Wang, Y., Putra, I. N. D., & Jin, X. (2023). Rural tourism resource management strategies: A case study of two tourism villages in Bali. Tourism Management Perspectives, 49, 101194. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101194

Sihotang, D. S., & Hidir, A. (2022). Strategi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Joint Tourism Pada Objek Wisata Sungai Gagak di Desa Koto Mesjid, Kabupaten Kampar, Riau. Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.36256/ijtl.v3i1.171

Rahman, Yuda Auliya. (2022). Tahun Ini Kabupaten Kudus Punya 13 Desa Wisata Baru | MURIANEWS. (n.d.). Retrieved October 30, 2021, from https://www.murianews.com/2021/05/19/218507/tahun-ini-kabupaten-kudus-punya-13-desa-wisata-baru

Ysf. (2022, September 3). Sejarah dan Pengelolaan Pijar Park [Personal communication].

Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ar-Ruzz Media.

© 2024 by the author. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.